

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi didefinisikan sebagai proses kolaboratif dalam mengajukan ide atau gagasan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama untuk satu visi yang sama. Secara etimologis, kerjasama atau berasal dari kata *co* dan *labor*, yang berarti memadukan tenaga atau kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.¹

Kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan memahami kegiatan satu sama lain. Faktanya, kolaborasi membuat

¹ Indiah Respati, *Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari*, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1 No. 1, Maret, 2022, hal 64.

karyawan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dari waktu ke waktu, terutama saat bekerja dalam tim. Apalagi ketika dihadapkan pada tantangan dari luar organisasi. Keadaan ini secara signifikan dapat meningkatkan kreativitas dalam bekerja, memperkuat semangat gotong royong dan bertujuan untuk menjadi lebih kuat dan sehat²

Menurut Chiu, kolaborasi terjadi ketika sekelompok orang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri sampai tujuan bersama tercapai. Efek kolaborasi adalah terciptanya hubungan manusia yang mendalam dan juga keterlibatan yang baik. Menurut Kvani, sekelompok peserta dalam kegiatan kolaboratif bekerja sama untuk sementara dan kemudian berpisah untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka secara berurutan, untuk bekerja secara mandiri

² Gustriani, A., Dari, T. W., Farizal, H., & Cahyadi, A. (2023). Strategi Pengabdian Masyarakat Melalui Kolaborasi Antar Mahasiswa (Studi Mahasiswa Penerima Beasiswa Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu). *KENDURI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 79-82.

dan tanggung jawab yang sesuai. Kerja sama berhasil jika pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana.³

2. Bentuk-Bentuk Kolaborasi

- a. Bentuk kolaborasi pengadaan, bentuk kerjasama ini dilakukan upaya untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan pada korban banjir
- b. Bentuk kolaborasi pengolahan, kerja sama ini dilaksanakan untuk mengelola bahan pangan, seperti penyediaan sayur, beras, kopi, gula, teh dan kebutuhan pangan lainnya. Kemudian pilihan logistik, tenda dan tikar juga disediakan

3. Indikator Kolaborasi

Indikatornya menunjukkan fleksibilitas dan kompromi, terlatih untuk siap mengambil keputusan bersama, luwes dalam pekerjaannya serta menerima kritik dan saran. Menurut pernyataan Triling, ukuran yang menggambarkan kemampuan berkolaborasi adalah

³ Moh. Saiful Hakiki, *Tinjauan Literatur Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Kolaborasi Desain*, WASTU: Jurnal Wacana Sains dan Teknologi, Vol. 3 No. 1, Oktober 2021, hal 39.

fleksibilitas, dimana keputusan bersama dibuat, kritik dan saran diterima, sudut pandang yang berbeda didiskusikan untuk mencari solusi masalah, dan kompromi. selalu dibuat. memecahkan masalah dalam tim.⁴

B. Kesiapan Tanggap Bencana

1. Pengertian Kesiapan Tanggap Bencana

Kesiapsiagaan tanggap bencana adalah kesiapan untuk bereaksi dengan segera atau cepat jika terjadi bencana yang terdiri dari kesiapsiagaan informasi, kesiapsiagaan psikologis dan kesiapsiagaan fisik. Kesiapan informasi menunjukkan bahwa responden sudah familiar dengan aktivitas kegagalan termasuk gagasan bencana mendasar, tahapan bencana, penilaian risiko bencana, pertemuan kegagalan dan pertemuan lemah.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa yayasan Baznas dan Dinas Sosial mempunyai

⁴ Ayu Rahmawati, dkk, *Analisis Keterampilan Berkolaborasi Siswa SMA Pada Pembelajaran Berbasis Proyek Daur Ulang Minyak Jelantah*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, Vol. 8 No. 2, 2019, hal. 438.

kemampuan reaksi kegagalan baik dari segi informasi, ilmu otak, maupun kesiapan fisik dan mental khususnya. kepastian dan responden untuk bertindak sebelum, saat ini, dan setelah bencana.

Baznas dan Dinas Sosial pada umumnya akan siap secara mental dalam menghadapi kegagalan, hal ini dapat dikaitkan dengan pemberian bantuan langsung kepada korban bencana dalam hal kesiapan nyata, masyarakat yang sehat dan tenaga kerja yang cukup, Baznas dan Dinas Sosial pada umumnya akan benar-benar siap, hal ini situasi. Menyinggung malapetaka para eksekutif. Dalam penelusuran ini disadari bahwa ketersediaan mental secara keseluruhan dapat mempengaruhi status aktual, khususnya persiapan aktual dapat berdampak pada persiapan mental begitu pula sebaliknya jika status mental adalah status aktual.

2. Jenis Kesiapan Tanggap Bencana

- a. Bencana lokal, yaitu bencana yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kota. Jika

tidak segera diatasi, akan menjadi bencana nasional.

- b. Bencana nasional, jadi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah/nasional.
- c. Bencana internasional, yaitu bencana yang dikelola oleh badan internasional atau gabungan negara-negara yang membantu penanggulangan bencana.⁵

3. Penanggulangan Bencana

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menghadapi bencana. Upaya tersebut adalah:

- a. Mitigasi yang juga bisa diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada dasarnya mitigasi merupakan usaha, baik kesiapsiagaan fisik, penanganan bencana alam maupun non fisik . Persiapan fisik dapat berupa tata ruang bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pelatihan bencana alam.

⁵ Ade Heryana, *Pengertian dan Jenis-Jenis Bencana*, (Januari, 2020)

- b. Korban harus ditempatkan di tempat. Menurut Deklarasi Hyogo No. yang ditetapkan pada Kobe dan Jepang pada pertengahan Januari 2005, "negara memiliki tanggung jawab dalam kebijakan nasional, pilihan dan sesuai dengan kemampuannya."
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
- d. Membentuk tim tanggap bencana penyuluhan.
- e. Pemindahan korban secara bertahap.

Indonesia sebagai leading sector penanggulangan bencana alam Selain semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, masalah penanggulangan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab dan kompetensi pemerintah daerah. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi koordinasi penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, dimana pemerintah pusat dan daerah

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana⁶

C. Manajemen Tanggap Bencana

1. Manajemen Risiko Bencana

Menurut Syarief dan Kondoatle (2006) yang mengutip Carter (2001), risiko bencana yang dihadapi para eksekutif adalah kegagalan dewan sebagai ilmu terapan, yang terfokus pada persepsi metodis dan latihan pemeriksaan bencana, dihubungkan dengan penghindaran, pengentasan, kesiapan, reaksi krisis dan pemulihan. . . Administrasi puncak mencakup pengaturan, penyusunan, koordinasi tanpa henti.

2. Tujuan dari pengurangan risiko bencana adalah:

- 1) mengurangi atau mencegah kerugian fisik, finansial atau mental terhadap individu atau jaringan dan negara;
- 2) mengurangi jumlah korban bencana sebesar .

⁶ Sri Heryati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2 No. 2, Agustus 2020, hal 141-142.

- 3) mempercepat pemulihan dan demi keamanan orang-orang yang ditinggalkan atau ditinggalkan ketika nyawa mereka berada dalam bahaya yang serius.

Menangani penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi bahaya kegagalan melalui perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengamatan dan penilaian pada setiap tahap penanganan bencana pada khususnya. sebelumnya, selama dan setelah kegagalan. Pada dasarnya langkah-langkah bencana yang dilakukan diwan adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap prabencana, terdiri dari keadaan dimana bencana tidak terjadi penanggulangan dan penanggulangannya;
- 2) Keadaan potensi bencana, kemampuan sebagai tahap kesiapan ketika terjadi bencana, kemampuan krisis dan tahap bantuan mendesak

setelah bencana, latihan pemulihan dan reproduksi.⁷



⁷ Ardia Putra, dkk. *Peran dan Kepemimpinan Perawat Dalam Manajemen Bencana Pada Fase Tanggap Darurat*, Idea Nursing Journal. Vol. 6 No. 1, hal 27-28